

# **PENANAMAN NILAI KEJUJURAN DAN TANGGUNG JAWAB MELALUI MATA KULIAH PENDIDIKAN ANTI KORUPSI PADA PROGRAM STUDI PPKn STKIP PGRI JOMBANG**

*Suminto*

*STKIP PGRI Jombang, Jl. Pattimura III  
suminto@stkipjb.ac.id*

## **Abstrak**

*Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan konten/isi materi mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi, mendeskripsikan nilai-nilai karakter, mendeskripsikan penanaman nilai-nilai kejujuran dan tanggung jawab melalui mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi pada mahasiswa angkatan 2017 program studi pendidikan pancasila dan kewarganegaraan STKIP PGRI jombang. Penelitian ini adalah kualitatif, data diperoleh melalui teknik wawancara dan studi dokumen. Data dianalisis secara deskriptif untuk mendapatkan jawaban dari fokus penelitian dengan tahap reduksi data, menyajikan data dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa, materi yang diberikan adalah delapan materi pokok sesuai pada Buku Pedoman Pendidikan Anti Korupsi dan Bahan Ajar Pendidikan Anti Korupsi, sementara terdapat sembilan nilai yang dikembangkan pada mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi, meliputi; Kejujuran, Kepedulian, Kemandirian, Kedisiplinan, Tanggung jawab, Kerja keras, Kesederhanaan, Keberanian, Keadilan. Proses penanaman nilai kejujuran yang dilakukan melalui proses perkuliahan, dosen menggunakan metode ceramah, diskusi dan penugasan kepada mahasiswa serta analisis kasus dan menggunakan pendekatan Student centered learning dan parsitipatory learning method. Pada kegiatan perkuliahan, dalam menanamkan dan mengembangkan nilai tanggung jawab dalam diri mahasiswa telah dilakukan dengan metode penugasan, mahasiswa diberi tugas untuk menyajikan sumbangan pemikiran para tokoh pendidikan, baik dari Indonesia maupun manca negara. Rincian tugas mencakup: (1) Riwayat Hidup Tokoh; (2) Pandangan Tokoh mengenai Pendidikan; (3) Karya-karya yang Dihasilkan; dan (4) Nilai-nilai yang Dapat Diteladani. Tugas tersebut harus diselesaikan oleh masing-masing kelompok satu minggu kemudian*

**Kata Kunci** : *Penanaman, Pendidikan Anti Korupsi, Nilai kejujuran, nilai tanggung Jawab*

## **PENDAHULUAN**

Indonesia bukannya tidak berupaya memberantas korupsi. Sejak era orde lama, orde baru, hingga era reformasi, pemerintah berusaha keras melakukan pemberantasan korupsi. Pada masa orde baru bahkan telah dikeluarkan TAP MPR mengenai pemberantasan korupsi dan puncaknya pada tahun 1971 pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971.

Meskipun sudah ada undang-undang dan tim khusus yang dibentuk Presiden Soeharto untuk menangani kasus-kasus korupsi, perbuatan korupsi masih saja dilakukan oleh para pengkhianat bangsa. Bahkan Soeharto turun dari jabatan, karena disinyalir ada indikasi KKN. Agenda pemberantasan KKN yang diusung oleh para mahasiswa pada tahun 1998 telah mendorong Soeharto untuk mengundurkan diri dari jabatannya.

Makin kronisnya tindak korupsi ini mendorong MPR mengeluarkan Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Salah satu dasar pertimbangan (konsiderans) dikeluarkannya TAP MPR ini adalah bahwa dalam penyelenggaraan negara telah terjadi praktik-praktik usaha yang lebih menguntungkan sekelompok tertentu yang menyuburkan korupsi, kolusi, dan nepotisme yang melibatkan para pejabat negara dengan para pengusaha, sehingga merusak sendi-sendi penyelenggaraan negara dalam berbagai aspek kehidupan nasional.

Strategi pemberantasan korupsi yang ditetapkan oleh KPK meliputi penindakan, dari strategi ini untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku maupun masyarakat luas, strategi yang kedua adalah pencegahan, strategi ini dimaksudkan untuk mempersempit celah korupsi melalui perbaikan sistem secara digital, strategi ketiga melalui pendidikan, strategi ini diharapkan masyarakat tidak melakukan tindak korupsi dengan cara membangun nilai dan strategi keempat partisipasi publik, yaitu dengan adanya partisipasi masyarakat, sejalan dengan strategi pemberantasan korupsi oleh KPK, Menristekdikti menetapkan Peraturan Menteri Riset teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi mengamanakan bahwa, Pendidikan Anti Korupsi wajib diselenggarakan melalui mata kuliah berupa sisipan atau insersi pada mata kuliah wajib umum (MKWU) atau mata kuliah yang relevan dan dapat juga sebagai mata kuliah yang berdiri sendiri.

Eko daryono (2013) menyatakan bahwa mahasiswa pada masa kini pun semestinya mewarisi jiwa kepemimpinan mahasiswa dan pemuda generasi sebelumnya. Kepemimpinan sangat dibutuhkan mahasiswa, karena bangsa dan negara ini memerlukan kehadirannya. Selain itu, kompleksitas permasalahan dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia ke depan, sangat membutuhkan mahasiswa yang memiliki karakter unggul, baik karakter intelektual, emosional, spiritual, maupun moral. Dalam situasi bangsa dan negara yang mengalami krisis kepercayaan, krisis moralitas, dan krisis kepemimpinan, maka sudah selayaknya mahasiswa mendapatkan pendidikan antikorupsi.

Pendidikan antikorupsi dibutuhkan, karena akan dapat membentuk karakter mahasiswa yang unggul, sekaligus juga diharapkan pada saatnya nanti ketika menjadi pemimpin dapat dipertanggungjawabkan kepemimpinannya.

Apalagi pada diri mahasiswa terdapat 3 (tiga) dimensi yang harus diasah secara berkelanjutan, yaitu: (1) intelektual, (2) jiwa muda, dan (3) idealisme (Saidi, 1989: 27). Ketiga dimensi atau karakter tersebut sangat diperlukan agar mahasiswa mampu memberikan kontribusi penting dalam menciptakan Indonesia yang unggul, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.

Perlunya pendidikan antikorupsi diberikan di perguruan tinggi baik sebagai mata kuliah tersendiri maupun terintegrasi dengan mata kuliah yang lain, secara khusus ditujukan untuk memberi bekal pengetahuan sekaligus mentransformasikan mahasiswa sebagai agen antikorupsi yang memiliki kompetensi dan komitmen moral yang tinggi (Azra, 2006: viii). Kompetensi dan komitmen ini selanjutnya ditransformasikan lagi ke dalam bentuk nilai-nilai dan gerakan antikorupsi kepada masyarakat dan generasi di bawahnya.

Program studi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan STKIP PGRI Jombang, terhitung sejak kurikulum 2015 hingga sekarang telah memasukkan mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi ke dalam kurikulum dengan bobot 2 SKS. Yang menarik adalah apakah konten materi nilai-nilai karakter dan penanaman nilai-nilai karakter yang dikembangkan sesuai dengan buku panduan yang ditetapkan oleh KPK atau tidak. Inilah pentingnya penelitian ini dilaksanakan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Djarm'an Satori (2011: 23) mengungkapkan bahwa penelitian kualitatif dilakukan karena peneliti ingin mengeksplor fenomena-fenomena yang tidak dapat dikuantifikasikan yang bersifat deskriptif seperti proses suatu langkah kerja, formula suatu resep, pengertian-pengertian tentang suatu konsep yang beragam, karakteristik suatu barang dan jasa, gambargambar, gaya-gaya, tata cara suatu budaya, model fisik suatu artifak dan lain sebagainya. Selain itu, Sugiono (2012: 9) juga mengemukakan penelitian kualitatif sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Ditinjau dari jenis datanya pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2007:6).

Adapun jenis pendekatan penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan kualitatif memiliki karakteristik alami (Natural serfing) sebagai sumber data langsung, deskriptif, proses lebih dipentingkan dari pada hasil. Analisis dalam penelitian kualitatif cenderung dilakukan secara analisis induktif dan makna makna merupakan hal yang esensial. (Lexy Moleong, 2006: 04).

Objek dalam penelitian kualitatif adalah objek yang alamiah, atau natural setting, sehingga penelitian ini sering disebut penelitian naturalistik. Obyek yang alami adalah objek yang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti sehingga kondisi pada saat peneliti memasuki objek, setelah berada di objek dan keluar dari objek relatif tidak berubah. Dalam penelitian kualitatif peneliti menjadi instrumen. Oleh karena itu dalam penelitian kualitatif instrumennya adalah orang atau *Human instrument*.

Penelitian ini dilaksanakan di Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan STKIP PGRI Jombang, dengan subjek penelitian Dr. KUSTOMO.MPd selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi dan mahasiswa prodi PPKn angkatan 2017 yang telah menempuh mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi. Data penelitian diperoleh melalui wawancara dan studi dokumen. Setelah peneliti mendapatkan data, kemudian peneliti menganalisis dengan menggunakan tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Materi Mata Kuliah Pendidikan Anti Korupsi Pada Program Studi PPKn STKIP PGRI Jombang**

Pendidikan Anti Korupsi dimaksudkan supaya setelah mengikuti Pendidikan Anti Korupsi orang tersebut bisa lebih kritis terhadap korupsi. Dampak dari mahasiswa yang telah mengikuti Pendidikan Anti Korupsi antara lain mengetahui bahaya dari tindak pidana korupsi. Bahaya tindak pidana korupsi antara lain dalam bidang ekonomi korupsi merusak perkembangan ekonomi suatu negara. Jika suatu aktivitas ekonomi dijalankan dengan unsur-unsur korupsi, maka pertumbuhan ekonomi yang diharapkan tidak akan tercapai. Menimbulkan efek pada kurangnya investasi dan kepercayaan. Hal ini dikarenakan para infestor menjadi ragu dan takut untuk mempercayakan modalnua untuk dikelola didaerah

yang korup. Tentunya dengan tidak adanya investor maka perputaran ekonomi di suatu daerah menjadi lambat atau bahkan berhenti

Tujuan atau capaian pembelajaran (*learning outcome*) Pendidikan Anti Korupsi di perguruan tinggi dalam bahasa KPK sesuai dengan misinya adalah terputusnya mata rantai korupsi di Indonesia. Dalam rumusan Ditjen Dikti, misi Pendidikan Anti Korupsi di perguruan tinggi adalah menghasilkan kepribadian antikorupsi pada diri pribadi mahasiswa serta membangun semangat sebagai *agent of change* bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang bersih dan bebas dari ancaman korupsi. Standar kompetensi yang ingin dicapai adalah mahasiswa mampu:

- 1) Mencegah dirinya sendiri agar tidak melakukan tindak korupsi (*individual competence*). Kompetensi individual dimulai dari mahasiswa memiliki persepsi negatif mengenai korupsi dan persepsi positif mengenai antikorupsi, menguatnya kesadaran (*awareness*) terhadap adanya potensi tindak korupsi. Mahasiswa akhirnya memiliki sikap antikorupsi dalam arti berusaha untuk tidak melakukan tindak korupsi sekecil apa pun.
- 2) Mencegah orang lain agar tidak melakukan tindak korupsi dengan cara memberikan peringatan. Sikap antikorupsi ini akan memberikan efek tular ke lingkungan sekitar; mahasiswa berani mengingatkan atau mencegah orang lain agar tidak melakukan tindak korupsi dalam bentuk apa pun, termasuk mampu memberikan informasi kepada orang lain mengenai hal-hal terkait korupsi dan antikorupsi.
- 3) Mendeteksi adanya tindak korupsi. Mahasiswa mampu mendeteksi adanya suatu tindak korupsi secara komprehensif mulai bentuk, proses, peraturan yang dilanggar, pelaku, kerugian/dampak yang ditimbulkan. Selanjutnya, mampu dihasilkan penyelesaian masalah (*problem solving*).

Pendidikan Anti Korupsi merupakan salah satu bentuk pencegahan terhadap korupsi. Tujuan pendidikan adalah menghaluskan budi. Melalui Pendidikan Anti Korupsi, diharapkan dapat dibentuk integritas setiap individu, diharapkan dapat memunculkan keteladanan terutama dari pengajar/dosen, pimpinan perguruan tinggi, dan lainnya, yang nantinya akan diteladani/diikuti oleh seluruh mahasiswa.

Berdasarkan studi pustaka, yang menjadi materi pada mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi menurut Buku Pedoman Pendidikan Anti Korupsi dan Bahan Ajar Pendidikan Anti Korupsi yang diterbitkan oleh KPK bersama Dirjen Dikti, menyebutkan ada delapan materi pokok, yaitu : : (1) Pengertian Korupsi, (2) Faktor Penyebab Korupsi, (3) Dampak Masif Korupsi, (4) Nilai dan Prinsip Anti Korupsi, (5) Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia, (6) Gerakan, Kerjasama dan Instrumen Internasional Pencegahan Korupsi, (7) Tindak Pidana

Korupsi dalam Peraturan Perundang-undangan, dan (8) Peranan Mahasiswa dalam Gerakan Anti Korupsi.

Sedangkan berdasarkan hasil wawancara dan studi dokumen Rencana Perkuliahan Semester dosen yang mengampu mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi, materi yang diberikan adalah delapan materi pokok sesuai pada Buku Pedoman Pendidikan Anti Korupsi dan Bahan Ajar Pendidikan Anti Korupsi (1) Pengertian Korupsi, (2) Faktor Penyebab Korupsi, (3) Dampak Masif Korupsi, (4) Nilai dan Prinsip Anti Korupsi, (5) Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia, (6) Gerakan, Kerjasama dan Instrumen Internasional Pencegahan Korupsi, (7) Tindak Pidana Korupsi dalam Peraturan Perundang-undangan, dan (8) Peranan Mahasiswa dalam Gerakan Anti Korupsi.

Dengan demikian ada kesesuaian antara materi pokok yang harus diajarkan pada kegiatan perkuliahan dengan materi yang diajarkan pada mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi di prodi PPKn STKIP PGRI Jombang.

### **Nilai-nilai Karakter Yang Dikembangkan Dalam Mata Kuliah Pendidikan Anti Korupsi Pada Program Studi PPKn STKIP PGRI Jombang**

Wibowo (2013:38) menyatakan bahwa Pendidikan Anti Korupsi adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan proses dan belajar mengajar yang kritis terhadap nilai-nilai anti korupsi. Dalam proses tersebut, maka Pendidikan Anti Korupsi bukan sekedar media bagi transfer pengalihan pengetahuan (kognitif), namun juga menekankan pada upaya pembentukan karakter (afektif), dan kesadaran moral dalam melakukan perlawanan (psikomotorik), terhadap penyimpangan perilaku korupsi. Dari pengertian tersebut dapat di simpulkan bahwa Pendidikan Anti Korupsi adalah usaha sadar untuk memberikan pemahaman dan pencegahan terjadinya perbuatan korupsi yang dilakukan melalui pendidikan formal, pendidikan informal, dan pendidikan nonformal.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Dr. Kustomo, M.Pd selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi, menjelaskan Nilai-nilai antikorupsi yang terdiri atas nilai inti, nilai etos, dan nilai/sikap. Substansi nilai tersebut dijabarkan ke dalam nilai-nilai yang dikembangkan melalui Pendidikan Anti Korupsi. Nilai-nilai Pendidikan Anti Korupsi di perguruan tinggi merujuk kepada nilai-nilai yang dikembangkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terdiri atas sembilan nilai yang disingkat “JUPE MANDI TANGKER KEBEDIL”. Meliputi :

- 1) Kejujuran,
- 2) Kepedulian,
- 3) Kemandirian,
- 4) Kedisiplinan,
- 5) Tanggung jawab,

- 6) Kerja keras,
- 7) Kesederhanaan,
- 8) Keberanian,
- 9) Keadilan.

Pendidikan Anti Korupsi tidak berlandaskan salah satu perspektif keilmuan secara khusus, tetapi berlandaskan fenomena permasalahan serta pendekatan budaya. Upaya ini lebih menekankan pada pembangunan karakter antikorupsi (*anti-corruption character building*) pada diri individu mahasiswa. Pendidikan Anti Korupsi (PAk) pada hakikatnya adalah suatu upaya pencegahan perilaku korupsi yang dapat dimulai dengan menanamkan nilai-nilai anti-korupsi pada semua individu, khususnya pada diri mahasiswa sebagai generasi muda yang bertanggung jawab sebagai calon pemimpin bangsa.

Memperhatikan data yang ada tentang nilai-nilai anti korupsi yang diajarkan dengan nilai-nilai anti korupsi pada umumnya terdapat kesesuaian/sejalan. Hal ini membuktikan bahwa nilai-nilai anti korupsi yang diberikan melalui mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi telah sesuai dengan apa yang KPK harapkan.

### **Penanaman Nilai Karakter Kejujuran Pada Mata Kuliah Pendidikan Anti Korupsi Pada Program Studi PPKn STKIP PGRI Jombang**

Menurut Mustari (2011: 19) kejujuran harus diterapkan sejak dini, di mana saja dan kapan saja. Guru dapat membuat peraturan yang dapat mengurangi, bahkan meniadakan ketidakjujuran untuk menegakkan kejujuran pada diri siswa di sekolah.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Dosen Pengampu mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi, menjelaskan bahwa dalam proses penanaman nilai-nilai kehidupan menghendaki adanya perubahan sikap atau perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku dimasyarakat. Penanaman sebagai suatu proses dalam membentuk karakter seseorang dilakukan demi memenuhi harapan dan tuntutan yang berlaku dimasyarakat dengan cara paksaan ataupun tidak. Sekolah sebagai lembaga pendidikan adalah salah satu tempat untuk mensosialisasikan nilai-nilai kehidupan agar nilai kehidupan yang diharapkan dalam masyarakat dapat tertanam kepada mahasiswa sebagai generasi muda penerus bangsa.

Berdasarkan studi dokumentasi pada dokumen Rencana Perkuliahan Semester, menyebutkan dalam proses penanaman nilai kejujuran yang dilakukan melalui proses perkuliahan, dosen menggunakan metode ceramah, diskusi dan penugasan kepada mahasiswa serta analisis kasus dan menggunakan pendekatan *Student centered learning* dan *participatory learning method*. Konsep dalam menanamkan nilai menjadi suatu objek yang menjadi acuan atau dasar untuk

dipatuhi. Nilai menuntut dan menuntun seorang individu maupun kelompok untuk patuh dan mengikuti aturan yang menjadi patokan atau dasar dalam bertingkah laku, karena sosialisasi yang menyentuh masyarakat.

Nilai kejujuran dalam kehidupan kampus yang diwarnai dengan budaya akademik sangat di perlukan. Nilai kejujuran ibaratnya seperti mata uang yang berlaku dimana-mana termasuk dalam kehidupan kampus. Jika mahasiswa terbukti melakukan tindakan yang tidak jujur, baik di lingkup akademik maupun sosial, maka selamanya orang lain akan selalu merasa ragu untuk mempercayai mahasiswa tersebut. Menurut Ulwan (2007) menyebutkan metode alternative yang dapat digunakan dalam penanaman nilai melalui proses pembelajaran dapat melalui : 1) Keteladanan; 2) pembiasaan; 3) nasihat; dan 4) bercerita.

Berdasarkan temuan data yang ada dan sumber pustaka yang digunakan peneliti dalam menganalisis data, terdapat kesesuaian dalam pelaksanaan penanaman nilai kejujuran melalui kegiatan perkuliahan mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi di prodi PPKn STKIP PGRI Jombang.

### **Penanaman Nilai Karakter Tanggung Jawab Pada Mata Kuliah Pendidikan Anti Korupsi Pada Program Studi PPKn STKIP PGRI Jombang**

Tanggung jawab adalah siap menanggung akibat dari perbuatan yang dilakukan, tidak buang badan. Tanggung jawab juga dapat berarti suatu bentuk lanjutan dari rasa hormat. Jika kita menghormati orang lain, berarti kita menghargai mereka. Jika kita menghargai mereka, berarti kita merasakan sebuah ukuran dari rasa tanggung jawab kita untuk menghormati kesejahteraan hidup mereka. Tanggung jawab merupakan bentuk lanjutan dari rasa hormat. Hormat terhadap diri sendiri ditindaklanjuti dengan rasa tanggung jawab atas dirinya; hormat terhadap orang lain ditindaklanjuti dengan tanggung jawab terhadap orang lain tersebut.

Berdasarkan Rencana Perkuliahan Semester (RPS) yang telah dimodifikasi sesuai dengan pendekatan terpadu nilai tanggung jawab dalam perkuliahan Ilmu Pendidikan. Berdasarkan dokumen RPS mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi, menyebutkan bahwa pada kegiatan perkuliahan, untuk menanamkan dan mengembangkan nilai tanggung jawab dalam diri mahasiswa telah dilakukan dengan metode penugasan, mahasiswa diberi tugas untuk menyajikan sumbangan pemikiran para tokoh pendidikan, baik dari Indonesia maupun manca negara. Rincian tugas mencakup: (1) Riwayat Hidup Tokoh; (2) Pandangan Tokoh mengenai Pendidikan; (3) Karya-karya yang Dihasilkan; dan (4) Nilai-nilai yang Dapat Diteladani. Tugas tersebut harus diselesaikan oleh masing-masing kelompok satu minggu kemudian.

Sibirian (2015) menjelaskan Tanggung jawab menunjuk kepada sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya. Melakukan atau



mengikuti kegiatan yang seyogyanya dilakukan untuk menjadikan dirinya teladan yang berakhlak mulia, contohnya: menyelesaikan semua tugas perkuliahan yang mendapatkan hasil terbaik secara tepat waktu;

1. Membuat rencana ke depan bagi dirinya tentang hal-hal yang terbaik untuk dicapai, contohnya: merencanakan dirinya menyelesaikan perkuliahan tepat waktu (selama empat tahun) dengan prestasi tertinggi;
2. Selalu mencoba menyelesaikan sesuatu yang belum dapat diselesaikannya, contoh: mencoba menyelesaikan sebuah soal yang belum didapatkan penyelesaiannya secara berulang-ulang lebih cermat sampai terselesaikan;
3. Selalu melakukan yang terbaik, contohnya: setiap tugas perkuliahan diselesaikan melalui upaya yang terbaik dapat dilakukannya;
4. Mengendalikan diri, contohnya: mampu mengendalikan diri tidak mengikuti sesuatu kegiatan yang tidak bermanfaat atau bahkan merusak dirinya (tidak mau mengikuti pesta minuman keras);
5. Mendisiplinkan diri, contohnya: mengikuti aturan yang dibuatnya dalam aktivitas sehari-hari guna mencapai target penyelesaian perkuliahan secara tepat waktu dengan prestasi terbaik (menepati roster kegiatan belajar di luar kampus yang dibuatnya sendiri);
6. Berpikir sebelum bertindak mempertimbangkan konsekuensi, contoh: membuat keputusan atau tindakan yang tidak menimbulkan penyesalan (tidak menjadi seorang perokok);
7. Menetapkan contoh yang baik bagi orang lain, contoh: menjadikan dirinya sebagai teladan bagi orang lain dalam bertutur, bersikap, dan bertindak (mengikuti seminar tepat waktu, bersikap baik, dan berbuat menjadi peserta terbaik); dan
8. Bertanggung jawab atas kata-kata, tindakan, dan sikap, contoh: melakukan refleksi diri, yakni kegiatan berpikir dan berdialog dengan dirinya sendiri tentang sesuatu tindakan yang dilakukan guna mengetahui kebaikan dan keburukannya dalam rangka meningkatkan kualitas tindakan itu di kemudian hari ( refleksi diri dalam pembelajaran).

Berdasarkan temuan data yang ada dan sumber pustaka yang digunakan peneliti dalam menganalisis data, terdapat kesesuaian dalam pelaksanaan penanaman nilai tanggung jawab melalui kegiatan perkuliahan mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi di prodi PPKn STKIP PGRI Jombang.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian paparan data penelitian dan pembahasan, peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Materi yang diberikan adalah delapan materi pokok sesuai pada Buku Pedoman Pendidikan Anti Korupsi dan Bahan Ajar Pendidikan Anti Korupsi (1) Pengertian Korupsi, (2) Faktor Penyebab Korupsi, (3) Dampak Masif Korupsi, (4) Nilai dan Prinsip Anti Korupsi, (5) Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia, (6) Gerakan, Kerjasama dan Instrumen Internasional Pencegahan Korupsi, (7) Tindak Pidana Korupsi dalam Peraturan Perundang-undangan, dan (8) Peranan Mahasiswa dalam Gerakan Anti Korupsi.
2. Terdapat sembilan nilai yang dikembangkan pada mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi, kesembilan nilai itu adalah. Meliputi : Kejujuran, Kepedulian, Kemandirian, Kedisiplinan, Tanggung jawab, Kerja keras, Kesederhanaan, Keberanian, Keadilan. Kesembilan nilai itu disingkat JUPE MANDI TANGKER KEBEDIL.
3. Proses penanaman nilai kejujuran yang dilakukan melalui proses perkuliahan, dosen menggunakan metode ceramah, diskusi dan penugasan kepada mahasiswa serta analisis kasus dan menggunakan pendekatan *Student centered learning* dan *participatory learning method*.
4. Pada kegiatan perkuliahan, dalam menanamkan dan mengembangkan nilai tanggung jawab dalam diri mahasiswa telah dilakukan dengan metode penugasan, mahasiswa diberi tugas untuk menyajikan sumbangan pemikiran para tokoh pendidikan, baik dari Indonesia maupun manca negara. Rincian tugas mencakup: (1) Riwayat Hidup Tokoh; (2) Pandangan Tokoh mengenai Pendidikan; (3) Karya-karya yang Dihasilkan; dan (4) Nilai-nilai yang Dapat Diteladani. Tugas tersebut harus diselesaikan oleh masing-masing kelompok satu minggu kemudian.

## **SARAN**

1. Kepada Dosen Pembina
  - a. Dosen pembina mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi tetap memiliki komitmen yang kuat untuk melaksanakan RPS yang sudah dibuat.
  - b. Perlu berinovasi dalam proses pembelajaran seiring kemajuan teknologi informasi, sebagai upaya menjawab tantangan dan kondisi yang ada.
  - c. Proses pembelajaran harus melibatkan partisipasi aktif dari mahasiswa
2. Kepada Program Studi PPKn

- a. Mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi memiliki arti yang sangat penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, oleh karena itu mata kuliah ini perlu dipertahankan keberadaannya sebagai mata kuliah yang mandiri.
- b. Mata kuliah wajib umum pada program studi perlu juga menyisipkan nilai-nilai anti korupsi dalam proses pembelajarannya.
- c. Dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi dapat dilaksanakan secara tim.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
- [2] Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas KKN dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
- [3] Handoyo, 2013 (Buku Suplemen Pendidikan Ankor)
- [4] Murphy, M.M. 1998. *Character Education in America's Blue Ribbon Schools*. Lancaster PA, Technomic.
- [5] Azra, Azyumardi. 2006. "Kata Pengantar Pendidikan Anti Korupsi Mengapa Penting". Dalam Karlina Helmanita dan Sukron Kamil (ed). *Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi*. Jakarta: CSRC UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- [6] KPK. 2007. *Buku Saku untuk Memahami Pandangan Islam terhadap Korupsi: Koruptor, Dunia Akhirat Dihukum*. Jakarta: KPK.
- [7] Pusat Bahasa Depdiknas. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- [8] Johnson, Michael. 2005. *Syndromes of Corruption: Wealth, Power, and Democracy*. Cambridge: Cambridge University Press.
- [9] Lambdorff, Johann Graf. 2007. *The institutional Economics of Corruption and Reform Theory, Evidence and Policy*. Cambridge: Cambridge University Press.
- [10] Klitgaard, Robert, Ronald Maclean-Abaroa dan H. Lindsey Parris. 2005. *Penuntun Pemberantasan Korupsi dalam Pemerintahan Daerah*. Terjemahan Masri Maris. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- [11] Tarling, Nicholas. 2005. "Introduction". In Nicholas Tarling (ed). *Corruption and Good Governance in Asia*. New York: Routledge.
- [12] Wibowo, I. 2006. "Pemberantasan Korupsi di Cina: Apa yang Bisa Kita Pelajari". *Makalah*. Disampaikan dalam Seminar Nasional AIPI XX di Medan tanggal 3-4 Mei 2006.
- [13] Nugraha D, Riant dan Tri Hanurita S. 2005. *Tantangan Indonesia Solusi Pembangunan Politik Negara Berkembang*. Jakarta:
- [14] Maheka, Arya. T.th. *Mengenali dan Memberantas Korupsi*. Jakarta: KPK RI
- [15] Suyanto, Totok. 205. "Pendidikan Anti Korupsi dan Pengembangan Budaya Sekolah". *JPIS*. Nomor 23 tahun XIII Edisi Juli – Desember 2005.
- [16] Kesuma, Dharma, dkk. 2011. *Pendidikan Karakter Kajian Teori dan Praktek di Sekolah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Mustari (2011: 13-15)

- [17] Nurul Zuriah, *Pendidikan Moral & Budi Pekerti Dalam Perspektif Perubahan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008
- [18] Abu, Munawar. 2007. *Psikologi perkembangan*. Jakarta : PT. Rineka Cipta Schiller & Bryan. 2002. *16 Moral Dasar Bagi Anak*. Jakarta: Elex Mediacomputindo
- [19] Baharuddin. 2010. *Pendidikan Dan Psikologi Perkembangan*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media
- [20] Harmin (2011), *Karakteristik Mahasiswa yang Bertanggung Jawab*, artikel dari harmin-newworld.blogspot.com.
- [21] Moleong, Lexy J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- [22] Ulfa, Dinia. (2014). *Meningkatkan tanggungjawab belajar dengan layanan konseling individual berbasis self. Management pada siswa kelas XI SMK Negeri 1 Pemalang Tahun Pelajaran 2013/2014*. Skripsi. Universitas Negeri Semarang. Dipetik dari <http://lib.unnes.ac.id/20089/1/1301409050.pdf>
- [23] Budiningsih, Asri. 2004. *Pembelajaran moral*. Jakarta : Rineka Cipta. Fishbein dan Ajzen: 1975
- [24] Ulwan. Abdullah Nashih, 2007. *Pendidikan Anak dalam Islam*. Jakarta. Pustaka Amani.
- [25] Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung : Alfabeta